

MEMBANGUN KELURAHAN BERINTEGRITAS DENGAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI YANG EFEKTIF

Lorensya Tabita Sitorus
Universitas Bandar Lampung

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : lorensyatabitasitorus@gmail.com

ABSTRACT

Building clean regions is an important step in realizing clean and transparent government. An effective anti-corruption strategy at the grassroots level can include several approaches, such as strengthening regulations, increasing community involvement, and anti-corruption education. By involving the public in monitoring and decision making as well as applying information technology for budget transparency, the risk of corruption can be minimized. Training and increasing awareness regarding integrity values are also important to strengthen collective awareness. Through this collaborative effort, subordinates can not only reduce corruption but also increase public trust and improve sustainable development. This learning method not only provides theoretical understanding in addition to forming character, developing moral values and training the skills needed to deal with corruption. With a focus on source and main impact of corruption, this education encourages society to be part of change.

Keyword: *Anti-Corruption, Integrity Education, Community Participation.*

ABSTRAK

Membangun daerah yang bersih merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Strategi antikorupsi yang efektif di tingkat bawah dapat mencakup beberapa pendekatan, seperti penguatan peraturan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan pendidikan antikorupsi. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengambilan keputusan serta penerapan teknologi informasi untuk transparansi anggaran, risiko korupsi dapat diminimalkan. Pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai nilai-nilai integritas juga penting untuk memperkuat kesadaran kolektif. Melalui upaya kolaboratif ini, bawahan tidak

Article History

Received: November 2024
 Reviewed: November 2024
 Published: November 2024
 Plagiarism Checker No 234
 Prefix DOI : Prefix DOI :
 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

hanya dapat mengurangi korupsi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Metode pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis selain membentuk karakter, mengembangkan nilai-nilai moral dan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi korupsi. Dengan fokus pada sumber dan dampak utama korupsi, pendidikan ini mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari perubahan.

Kata Kunci: Antikorupsi, Pendidikan Integritas, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Korupsi, yang berasal dari bahasa Latin "*corruption*," dalam bahasa Inggris juga disebut "*corruption*" dan dalam bahasa Belanda "*corruptive*," merujuk pada tindakan yang merusak, tidak jujur, dan biasanya terkait dengan keuangan. Menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan ilegal kepada diri sendiri atau orang lain, dengan cara menyalahgunakan jabatan atau karakter seseorang, yang bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain. Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki dampak positif, terutama dalam kesetaraan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun, kesejahteraan masih belum tercapai sepenuhnya, terutama bagi rakyat kecil. Banyak aparat pemerintah daerah yang melakukan tindakan korupsi dan menyalahgunakan tugas serta wewenangnya, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.¹

Korupsi dapat secara umum diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Istilah ini juga mencakup perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang dekat dengan pejabat birokrasi. Dalam konteks pelayanan publik, korupsi ini disebut "korupsi administrasi," yang berfokus pada tindakan individu yang memegang kendali dalam posisinya sebagai pejabat publik, pembuat kebijakan, atau pegawai birokrasi pemerintah, dalam berbagai aktivitas atau keputusan. Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional, terutama dalam konteks pembangunan di tingkat kelurahan. Oleh

¹ Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya* (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *Iblam Law Review*

karena itu, korupsi harus diberantas karena dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan nasional.²

Korupsi di Indonesia telah meresap ke dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, menjadi bagian dari kebiasaan hidup, perilaku sosial, dan pola pikir masyarakat. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyelewengan dan a untuk keuntungan pribadi. Fenomena ini terus berkembang dan semakin mengakar, sehingga korupsi dianggap sebagai kejahatan yang menggerogoti fondasi bangsa Indonesia. Dalam berbagai literatur, gerakan antikorupsi memainkan peran krusial dalam mengatasi masalah korupsi. Mengingat semakin banyaknya kasus korupsi yang diungkap di berbagai media sosial di Indonesia, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting agar tidak merusak nilai-nilai bangsa yang sejalan dengan ideologi negara.³

Tingkat korupsi yang tinggi memiliki dampak serius terhadap perkembangan sosial-budaya dan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan penelitian Sumaryati, Indonesia memperoleh skor indeks persepsi korupsi 40 dari 100, menempatkannya di posisi ke-85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019. Sementara itu, Arliman mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori negara paling korup dalam survei yang dilakukannya, dengan beberapa alasan utama. Pertama, secara kualitatif, terdapat indikasi kuat adanya praktik-praktik korupsi di berbagai instansi. Kedua, masyarakat sering kali kesulitan membedakan antara tindakan korupsi dan kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mayoritas tindakan korupsi dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Ketika pejabat pemerintah menggunakan kewenangan mereka untuk melakukan korupsi dan hal ini diketahui publik, akan semakin banyak kasus korupsi yang muncul. Oleh karena itu, untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam tindakan korupsi, diperlukan pembinaan karakter yang kuat. Strategi ini melibatkan tiga pendekatan utama: pendidikan moral dalam keluarga, penegakan hukum yang tegas, dan pembinaan etika bagi aparatur pemerintah.

Korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya sangat luas, mulai dari merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, hingga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Untuk melawan korupsi, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak, termasuk masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas anti korupsi merupakan langkah krusial dalam membangun bangsa yang bersih dan bermartabat.⁴

Secara nyata, dampak dari pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

² Azmii, A. F., Tika, A., Fitri, D. S., & Septiyar, M. 2024. *Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*

³ Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik.*

⁴ Aminuddin, A. M. A., Suhana, S., Lestari, D., Nurhaedah, N., & Sangkala, S. 2023. *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter; Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Di Stikes Amanah: Anti-Corruption Education As Character Building And Individual Behavior Through Student Potential In Stikes Amanah. Jurnal Ilmiah Amanah Akademika.*

untuk melaksanakan dan mengurus urusan pemerintahan dan warga kampungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Positive*, khususnya dalam hal kesetaraan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah. Namun, sampai saat ini belum stabil terutama bagi orang-orang yang kurang mampu, serta anggota staf pemerintah daerah yang tidak adil kepada masyarakat karena banyak aparat pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan tanggung jawab serta wewenang yang dia miliki sebagai pejabat desa atau kota.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan, data sekunder berupa artikel resmi, jurnal hukum, artikel hukum yang masih relevan dan berkaitan dengan tema kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis. Menurut Bungin, format deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan yaitu untuk menggambarkan, meringkas informasi situasi dan kondisi dari hasil data yang dikumpulkan dengan menarik realitas itu ke permukaan sebagai tanda pengenalan suatu ciri atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu. Dengan metode penelitian ini dapat mewujudkan pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di kantor kelurahan.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Pentingnya Peran Kelurahan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dalam Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab aparat sipil negara (ASN), termasuk pemerintah kelurahan yang berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu fungsi paling penting dalam pemerintahan, di mana pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik sebagai manifestasi dari peran ASN. ASN yang bertugas di kelurahan adalah garda terdepan dalam menjalankan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai barisan terdepan dalam pelayanan publik, integritas tinggi sangat diperlukan dari para ASN agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat.

Pada dasarnya, membangun kelurahan yang berintegritas merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Hal ini mencakup perhatian, kasih sayang, dan perilaku dari pejabat yang berwenang, yang harus menunjukkan integritas tinggi demi menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik. Integritas menuntut aparat sipil negara di kelurahan untuk berani bersikap jujur, transparan, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka juga harus membiarkan

integritas menjadi penentu utama dalam kinerja mereka.⁵

Peran kelurahan dalam membangun integritas anti korupsi di masyarakat sangat penting, dengan ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam upaya membangun integritas dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi diantaranya:

1. Pendidikan dan Penyuluhan: Kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya korupsi, pentingnya transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.
2. Partisipasi Masyarakat: Melalui berbagai forum dan kegiatan, kelurahan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Langkah ini dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif di kalangan masyarakat.
3. Penerapan Kebijakan: Kelurahan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung integritas, seperti pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi.
4. Keterbukaan Informasi: Meningkatkan keterbukaan informasi publik tentang kegiatan dan penggunaan anggaran kelurahan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengawasi proses pengambilan keputusan.
5. Penguatan Jaringan: Kelurahan bisa membangun jaringan dengan berbagai lembaga anti korupsi dan komunitas untuk memperkuat gerakan anti korupsi di tingkat lokal.
6. Model Perilaku: Aparat kelurahan, sebagai contoh, diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang berintegritas, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat.⁶

Selain itu juga dari penelitian amati menunjukkan, Pertama Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kelurahan sudah berjalan sesuai dengan semestinya, seperti adanya komitmen yang tinggi serta usaha dengan semaksimal mungkin, seluruh staf dalam menjalankan operasional dalam kelurahan. Penerapan evaluasi internal setiap minggu. Kedua, terkait faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan aturan ini di lingkungan masyarakat yaitu adapun faktor pendukungnya pelayanan atas tanggapan keluhan yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat ditangani. Sementara itu, faktor penghambat yang penulis temukan pada implementasi peraturan ini di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan ialah masih ditemukannya para perwakilan Rw/Rt yang menanggapi adanya aturan dengan acuh tak acuh.⁷

B. Strategi Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi yang Efektif

Kesadaran terhadap dampak buruk korupsi memainkan peran vital dalam membentuk masyarakat yang lebih beretika, adil, dan berkelanjutan. Di era di mana korupsi merajalela dan mengancam keseimbangan sosial serta pembangunan, pemahaman tentang konsekuensi negatif korupsi menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik

⁵ Setiavani, E. F., & Basyar, M. R. 2022. Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Program Kalimasada Di Kantor Kelurahan Karah Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.

⁶ Taufik, T., & Nurwahidah, N. 2023. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *Jpin: Jurnal Pendidik Indonesia*.

⁷ Maisondra, M. 2022. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*.

merusak tersebut. Kesadaran akan dampak buruk korupsi bukan hanya sekadar pengenalan terhadap kerugian ekonomi, tetapi juga memberikan pencerahan yang membuka mata masyarakat terhadap efek merusak yang meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan menghambat perkembangan berkelanjutan. Memahami dampak korupsi mengajarkan masyarakat tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan kolektif.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, pemahaman ini menjadi dasar penting untuk menjaga integritas dan moralitas. Kesadaran akan dampak buruk korupsi mengingatkan kita bahwa setiap tindakan koruptif memiliki konsekuensi jangka panjang. Dana yang disalahgunakan tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga menghambat akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang pekerjaan. Oleh karena itu, kesadaran ini menumbuhkan empati sosial dan rasa tanggung jawab kolektif untuk melindungi sumber daya bersama demi kesejahteraan bersama.⁸

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas anti korupsi membutuhkan strategi yang tepat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- a) Pendidikan anti-korupsi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Materi pendidikan ini harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
- b) Sosialisasi dan kampanye anti-korupsi dapat disebarluaskan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan media cetak. Kampanye ini harus disusun dengan cara yang kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian serta meningkatkan kesadaran masyarakat secara efektif.
- c) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang integritas anti korupsi.
- d) Penguatan peran media massa: Media massa memiliki peran penting dalam membangun opini publik dan mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi. Media massa perlu berperan aktif dalam memberitakan kasus korupsi, mengedukasi masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
- e) Pendidikan dan Pelatihan: Institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus memasukkan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum mereka. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang korupsi, dampaknya, dan cara melawannya, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi.
- f) Kampanye Publik: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat meluncurkan kampanye publik yang menyoroti bahaya korupsi. Penggunaan media sosial, iklan, dan

⁸ Arfa, A. M. 2023. *Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. Jendela Pengetahuan.*

acara komunitas dapat membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran secara luas.

- g) **Pelibatan Komunitas:** Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam forum diskusi, seminar, dan lokakarya tentang korupsi dapat meningkatkan pemahaman mereka. Kegiatan ini juga memberikan platform bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam melawan korupsi.
- h) **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi tentang korupsi dan saluran pelaporan yang aman dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Aplikasi dan situs web yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi secara anonim dapat menjadi alat yang efektif.
- i) **Kemitraan dengan Media:** Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Mendorong media untuk mengangkat isu korupsi secara rutin dan mendalam dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Investigasi jurnalistik yang baik dapat membuka mata masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi.

Antikorupsi melibatkan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik seperti pencucian uang dan suap, yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk mengatasi korupsi, kontribusi dari pemerintah sangat diperlukan. Fokus utama dalam pencegahan korupsi adalah pendidikan untuk generasi muda, agar mereka tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan perilaku yang menolak korupsi sebagai strategi pencegahan. Menurut Eliezar, pendidikan antikorupsi mencakup pembentukan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan. Berbeda dengan pandangan Salistina yang menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan dalam lingkungan formal untuk membedakan antara tindak kejahatan korupsi dan bentuk kejahatan lainnya.⁹

C. Tantangan dan Solusi dalam Membangun Kelurahan Berintegritas

Membangun kelurahan berintegritas adalah sebuah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang tepat, upaya ini dapat berhasil. Berjalannya Kelurahan berintegritas memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Dengan mengenali tantangan yang ada dan menerapkan solusi yang tepat, kelurahan dapat menjadi contoh dalam pencegahan korupsi. Keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam membangun kelurahan berintegritas.¹⁰

⁹ Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. *Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*.

¹⁰ Ja'far, M. 2018. *Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. *Madani Legal Review*.

1. Tantangan

- a) **Kurangnya Kesadaran Masyarakat**
Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep integritas dan pentingnya pencegahan korupsi. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan ketidakpedulian terhadap praktik korupsi, baik yang kecil maupun besar. Hal ini bisa membuat masyarakat cenderung menerima praktik-praktik yang tidak etis sebagai hal yang wajar.
- b) **Birokrasi yang Rumit**
Proses administrasi yang panjang dan rumit sering kali menjadi penghalang transparansi. Ketidakjelasan dalam alur pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran dapat menimbulkan peluang bagi korupsi. Birokrasi yang tidak efisien juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.
- c) **Minimnya Sumber Daya**
Banyak kelurahan yang menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. Tanpa dukungan yang memadai, sulit untuk menerapkan program-program yang mendorong integritas dan transparansi. Keterbatasan ini sering mengakibatkan ketidakmampuan untuk memberikan pelatihan yang diperlukan bagi aparatur dan masyarakat.
- d) **Budaya Korupsi yang Mengakar**
Di beberapa daerah, budaya korupsi telah menjadi bagian dari sistem sosial. Praktik suap dan kolusi bisa dianggap sebagai cara yang biasa untuk menyelesaikan masalah. Mengubah budaya ini memerlukan waktu dan usaha yang konsisten dari semua pihak terkait.
- e) **Ketidakpahaman tentang Pelaporan**
Banyak warga yang tidak tahu bagaimana melaporkan kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Tanpa mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses, masyarakat merasa tidak berdaya untuk mengambil tindakan.

2. Solusi

- a. **Edukasi dan Penyuluha**
Mengadakan program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat sangat penting. Pelatihan dan seminar tentang integritas, nilai-nilai etika, dan dampak korupsi dapat meningkatkan kesadaran. Menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi juga dapat menjangkau lebih banyak orang.
- b. **Sederhanakan Proses Administrasi**
Pemerintah kelurahan harus berupaya untuk menyederhanakan proses administrasi. Digitalisasi layanan publik, seperti pendaftaran dan pengajuan permohonan, dapat meningkatkan transparansi. Dengan mengurangi birokrasi yang rumit, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dan berpartisipasi dalam pengawasan.

c. Penguatan Kapasitas

Melatih aparatur kelurahan dalam pengelolaan anggaran dan prinsip-prinsip akuntabilitas sangat penting. Program peningkatan kapasitas harus mencakup teknik pengelolaan yang baik, penggunaan teknologi, dan cara-cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif.

d. Kampanye Anti Korupsi

Melakukan kampanye bersama yang mendorong integritas dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Acara komunitas, lomba, dan kegiatan lainnya dengan tema anti korupsi dapat menciptakan kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen masyarakat terhadap integritas.

e. Membangun Sistem Pelaporan yang Efektif

Mengembangkan saluran pelaporan yang aman, anonim, dan mudah digunakan akan memberi masyarakat kepercayaan untuk melaporkan dugaan korupsi. Penyuluhan tentang cara menggunakan sistem ini sangat penting agar masyarakat merasa terlibat dan berdaya.

f. Keterlibatan Stakeholder

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) akan memperkuat upaya pencegahan korupsi. Menciptakan forum diskusi atau jaringan kerjasama dapat meningkatkan koordinasi dan berbagi informasi antar pihak yang peduli terhadap integritas.

g. Evaluasi dan Pengawasan Berkal

Melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap program-program yang telah dijalankan dapat membantu menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil. Melibatkan masyarakat dalam proses ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Dengan ini kelurahan diharapkan dapat menjadi model dalam pencegahan korupsi dan integritas. Dimana tantangan serta solusi merupakan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Membangun kelurahan berintegritas dengan strategi pencegahan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pemerintah memberikan pelayanan berdasarkan integritas pada, menciptakan struktur pemerintahan yang memungkinkan pemerintah mencapai pelayanan pemerintahan yang baik. Aparatur yang berintegritas diharapkan mampu menjalankan proses pemerintahan agar tidak menimbulkan praktik-praktik seperti pelayanan yang diskriminatif, kolusi, korupsi dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara (kelurahan) yang jujur akan menyikapi segala bentuk kebutuhan dan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memastikan transparansi, mendorong partisipasi aktif, dan memanfaatkan teknologi, diharapkan kelurahan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pencegahan korupsi.

Masyarakat juga sadar akan nilai nilai integritas dalam pencegahan korupsi. Maka dari itu program edukasi yang menekankan integritas dapat dilakukan melalui seminar, sosialisasi, dan masih banyak lagi program edukasi dalam pencegahan korupsi di tingkat kelurahan. Selain dari itu implementasi transparansi dalam pengolahan anggaran dan kegiatan pemerintahan sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari atau di akses mengenai penggunaan dana, proyek, dan keputusan yang diambil dan ditanggapi masyarakat dengan baik, sehingga tercapai akuntabilitas yang baik dalam kelurahan. Komitmen bersama dari semua pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan langkah-langkah diatas, kelurahan tidak hanya akan lebih baik dalam hal integritas, tetapi juga dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, A. M. A., Suhana, S., Lestari, D., Nurhaedah, N., & Sangkala, S. 2023. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Di Stikes Amanah: Anti-Corruption Education As Character Building And Individual Behavior Through Student Potential In Stikes Amanah. *Jurnal Ilmiah Amanah Akademika*.
- Arfa, A. M. 2023. Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. *Jendela Pengetahuan*.
- Azmii, A. F., Tika, A., Fitri, D. S., & Septiyar, M. 2024. Dampak Dan Upaya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*.
- Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). *Iblam Law Review*
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*.
- Ja'far, M. 2018. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*.
- Maisondra, M. 2022. Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur).
- Setiavani, E. F., & Basyar, M. R. 2022. Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Program Kalimasada Di Kantor Kelurahan Karah Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
- Taufik, T., & Nurwahidah, N. 2023. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *Jpin: Jurnal Pendidik Indonesia*.